
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DIDESA KABUPATEN SINTANG

Martinus Syamsudin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray
No. 92, Sintang, Indonesia, email: *martinussyamsudin1974@gmail.com*

Abstract: *The main problem examined in this research is the development of road infrastructure in villages in Sintang Regency. Therefore, the objectives of this study are to determine, describe, and analyze the development of road infrastructure in villages in Sintang Regency. This research method uses descriptive research. The subjects were the Village Head, Hamlet Head, and the community. The research techniques used for data collection were observation, interviews, and documentation studies, with data analysis using qualitative descriptive analysis methods. The results of this study indicate that the majority of residents support the improvement of village road infrastructure in planning village road development to facilitate daily activities and economic progress. Community participation in road infrastructure development has been effective in decision-making, implementation, and utilization. The conclusion of this study is that village road development planning has been carried out through the construction of new roads and repairs to facilitate daily activities and economic progress. Community participation in road infrastructure development has involved all elements of the community. Coordination has been established.*

Keywords: *Planning, Development, and Roads.*

Abstrak: Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pembangunan Infrastruktur Jalan Didesa Kabupaten Sintang. dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Pembangunan Infastruktur Jalan Didesa Kabupaten Sintang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif. Subjek dalam yakni orang yakni Kepala Desa, Kepala Dusun dan Masyarakat, dengan Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini yakni Perencanaan Pembangunan jalan di desa sebagian besar masyarakat mendukung adanya perbaikan infrastruktur jalan desa demi kelancaran masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari demi kemajuan perekonomiannya. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan, sudah berpartisipasi dengan baik, dalam hal pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan. Kesimpulan Penelitian ini yakni Perencanaan Pembangunan jalan di desa telah dilakukan dalam pembuatan jalan baru, perbaikan jalan desa demi kelancaran masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari demi kemajuan perekonomiannya. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan telah dilakukan dengan melibatkan semua unsur Masyarakat. Koordinasi telah dilakukan.

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan dan Jalan.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah Pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan

masyarakat seluruhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha Pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai

subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani. Wilayah negara Indonesia terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten atau kota, kecamatan dan desa. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur.

Desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga yang besar, yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Pola hubungan dan tingkat komunikasi pun masih sangat rendah, terutama di pedesaan terpencil dan pedalaman. Menurut UUNo 32 tahun 2004, merupakan *self community*, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan social budaya setempat, posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Hal tersebut dengan otonomi desa yang mempengaruhi secara signifikan perwujudan dan otonomi daerah.

Otonomi berarti kemandirian untuk menentukan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri merupakan hal dan kebebasan setiap warga masyarakat tanpa melihat status politik internasional atau wilayah yang mereka huni. Ketentuan ini hanya berlaku bagi rakyat diberbagai wilayah yang belum merdeka secara politik, tetapi juga pada rakyat diberbagai negara yang merdeka dan berdaulat. Penentuan nasib dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal berarti rakyat dalam suatu negara

yang berdaulat maupun yang masih bergantung pada negara, memiliki hak untuk menentukan kebijakan sosial, ekonomi, dan budaya. Rakyat bebas menentukan status politik dan bebas mengejar Pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan mereka sendiri.

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah, pembangunan memiliki pengertian sebagai Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan juga bias melakukan perubahan kearah yang lebih baik, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan Masyarakat. keadaan yang serba terbatas seperti hal diatas tersebut berdampak pada masyarakat tempat yang merasa tertinggal dan tersisih dari daerah pusat pemerintahan kabupaten. Untuk itu pemerintah harus mengetahui bahwa pelaksanaan pembangunan tidak saja untuk masyarakat dan oleh masyarakat melainkan harus pula dipandu dengan Bersama masyarakat.

Beberapa infrastruktur desa rusak namun permasalahan pokok yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang kurang merata. Sehingga perlu penanganan yang serius dari pemerintah. Dimana dalam keberlangsungan Pembangunan desa tidak terlepas dari peran serta Masyarakat dan perangkat desa. Yang mana peran dari aparat desa maupun masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa. Pada realitanya masyarakat desa kebanyakan tidak merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Apalagi dalam pembangunan infrastruktur jalan, kondisi jalan Desa sangat memperhatikan. Jalan dipenuhi dengan genangan air dan tanah kuning serta

berlobang. Sampai saat ini jalan belum di aspal, pembangunan infrastruktur jalan hanya di gusur dan ditimbun tanah tidak bertahan lama disebabkan pembangunannya terkesan asal-asalan sehingga dalam waktu sebulan, dua bulan jalan tersebut rusak kembali, Pemerintah desa membangun jalan yang sekiranya berbahaya dilewati ketika musim hujan tiba, jalan tersebut diselimuti oleh tanah dan tidak bias dilewati oleh kendaraan. jika dipaksakan untuk digunakan dapat menyebabkan keselamatan pengendaranya terancam.

Dalam hal ini pemerintah desa harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat menggunakan fungsi dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa atau kelurahan merupakan realisasi Pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa, peran pemerintah desa serta partisipasi seluruh masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah desa merupakan penyelenggara dan penanggungjawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan yang ada diwilayahnya.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah harus memusatkan pikiran kepada apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Taufiqurokhman, (2008:3) bahwa “meramalkan sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik dilihat dari aspek

ekonomi, social, maupun lingkungan politik tempat organisasi berorganisasi serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut”.

Definisi perencanaan dikemukakan oleh Erly Suandy (2001:2) bahwa “Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh”. Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan secara menyeluruh. Merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia karena untuk pertama kali memiliki Undang-undang Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, karena selama ini perencanaan pembangunan di daerah diatur di tingkat Menteri misalnya Kepmendagri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pedoman Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah (P5D).

Selain Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, ditetapkan pula Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya dari ke 3 Undang-undang tersebut mengatur tentang perencanaan pembangunan. Hal yang sangat mendasar dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa proses pembangunan di daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan nasional. Oleh karena itu baik mekanisme, penganggaran dan substansinya harus mencerminkan keterkaitan antara pusat dan daerah. Dasar Pelaksanaan Musrenbang adalah Surat Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Dalam Negari Nomor 0259/M.PPN/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005. Pengertian musrenbang (musyawarah perencanaan Pembangunan) adalah forum di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah sertasebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Proses Musrenbang memajukan setiap daerah mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat.

Partisipasi Masyarakat

proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 58), definisi tersebut menunjukkan bahwa “partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Menurut Schubeler, tingkat peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan tergantung pada sikap warga dan efektivitas organisasi masyarakat (Schubeler, 2011). Di samping itu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan serta mata pencaharian (Slamet, 2013). Jenis Kelamin.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah membutuhkan suatu rancangan atau jenis penelitian. Hal ini dikarenakan dengan rancangan penelitian akan diperoleh pedoman dalam melakukan penelitian secara sistematis, dan terarah. Oleh karena itu setiap penelitian tentulah mempunyai sasaran atau objek, untuk menjadi sasaran dalam karya ilmiah. Kemudian disamping itu pula pemilihan terhadap jenis penelitian tersebut harus juga sesuai dan relevan dengan masalah dan tujuan dari penelitian agar penelitian memperoleh data yang tepat (*valid*) sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau menggambarkan keadaan ataupun kejadian. Penelitian deskriptif menurut Narwisi masyarakat (1993:63) adalah dapat diartikan “Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidik dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti, Menurut Faisal (2005:109): “subjek penelitian adalah menunjuk pada orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (Kasus) yang diteliti”. Subjek penelitian ini yakni seluruh komponen yang berhubungan dengan Pembangunan Inprastruktur Jalan Di Desa Kabupaten Sintang baik yang menyangkut manusia, atau benda-benda maupun lainnya yang terdapat dalam suatu penelitian. Pemilihan informan ini karena mereka di anggap mengetahui tentang kebijakan dan program dalam pembuatan jalan desa, Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Kepala Dusun/Kewilayahan

3. Masyarakat Desa

Dalam pengumpulan data diperlukan alat yang tepat agar data yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian dapat tercapai sesuai dengan tujuan penelitian, untuk setiap penelitian alat pengumpulan data haruslah akurat dan objektif agar dapat memberikan hasil yang baik dan optimal. Menurut Arikunto (1998:134), “alat pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya”. Oleh karena itu dalam penelitian ini Peneliti menggunakan alat alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk memperoleh informasi, dalam hal ini Peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung menyangkut Pembangunan Inprastruktur Jalan Di Desa Kabupaten Sintang.
2. Panduan Observasi yaitu Peneliti melakukan pengamatan dengan cermat terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan Pembangunan Inprastruktur Jalan Di Desa Kabupaten Sintang.
3. Untuk memperoleh dukumentasi digunakan alat Bantu fotocopi, *Smartphone*, yang berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Inprastruktur Jalan Di Desa Kabupaten Sintang.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Miles dan Huberman (2014:24) dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap

digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Teknik analisis juga mendasarkan pada ketiga alur kegiatan analisis tersebut, yang pada dasarnya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat melakukan reduksi data boleh jadi pada saat itu sekaligus dilakukan pembuatan format penyajian data yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan

Pembangunan infrastruktur memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasilnya, yang mengarah pada pembangunan keadilan sosial bagi semua orang. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu aspek yang menentukan dalam menjamin kelancaran pembangunan suatu daerah, tidak dimilikinya infrastruktur yang memadai, pembangunan cenderung lamban, dengan hasil yang kurang optimal. Adanya pembangunan infrastruktur yang memadai ada kecenderungan penyelenggara pemerintah di daerah akan lebih lancar dan aman, bahkan keefektifan pembangunan daerah akan dapat terwujud. Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada visi dan misi daerah hendaknya diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien serta tepat sasaran sehingga hasil yang dicapai dapat dinikmati oleh semua komponen masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus

dilakukan untuk mendukung pembangunan wilayah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan semua unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan gampong. Fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna untuk masyarakat dan berhasil guna untuk masyarakat, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan dalam pembangunan agar pembangunan itu lebih terarah.

Melakukan perencanaan pembangunan jalan desa melibatkan seluruh masyarakat, melalui yang namanya musyawarah dusun, dan setiap dusun yang ada di Desa melakukan rapat terhadap apa yang menjadi prioritas Pembangunan di dusun tersebut. Di Mana masing-masing dusun dibuatkan dulu musrebang dusunnya, jadi semua aspirasi masyarakat yang ada di setiap dusun dituangkan dalam rapat musrebang dusun termasuk juga tentang pembangunan jalan desa.

Pada Tingkat Dusun Sepakat dilakukannya pembangunan jalan usaha tani yang mempermudah para petani untuk akses menuju usaha-usaha mereka dan distribusi, karena di Desa adalah mayoritas mata pencahariannya petani. Dari hasil musdus inilah yang menjadi dasar dalam Pembangunan jalan didesa.

Pelaksanaan pembangunan jalan desa diperlukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan juga tenaga kerja untuk pengerjaannya agar pembangunan jalan tersebut dapat diselesaikan dengan tepat dan benar. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan Desa harus ada tenaga kerjanya untuk pengerjaannya, selanjutnya ke biayanya untuk pembangunan apalagi ke pembangunan jalan itu membutuhkan anggaran dana yang besar.

Biaya juga jadi suatu penentu bagi pembangunan yang akan di laksanakan, bahwa mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui musrebang tadi akan diberitahukan kepada masyarakat: „Semua pembangunan yang ada di desa ini termasuk pembangunan jalan pasti akan dipublikasikan, dananya akan kita buat baliho yang kemudian akan kita tempelkan agar semua masyarakat desa bisa melihatnya. Jadi masyarakat ikut mengawasi semua pembangunan yang ada di desa. Pelaksanaan pembangunan jalan yang menjadi fokus pada pelaksanaannya dilihat dari pengguna manfaat jalan itu di dusun yang mana paling banyak pengguna manfaatnya dan disitulah yang akan diperbarui atau diperbaiki jalannya.

Adapun aspek-aspek perencanaan yang dilakukan oleh pihak Pemerintahan Desa, bahwa akses jalan menuju ke Dusun merupakan status jalan desa maka langkah pertama yang di ambil adalah melakukan pertemuan antar dusun mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam mengajukan usulan program pembangunan infrastruktur jalan kepada pemerintah supaya dapat mengakses dana-dana yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan infratraktur jalan.

Pembuatan perencanaan Kepala Desa melibatkan masyarakat seperti Ketua RT dan RW pada setiap Dusun, yaitu dengan melakukan musrebangdes (Musyawarah

Rencana Pembangunan), dengan adanya hasil dari musrembangdes yaitu berupa usulan dimana usulan tersebut dibawa kepada Bapak Camat serta Bupati Sintang. kemudian hasil musrembang telah disepakati Bersama dan pihak-pihak yang terkait menyetujui perencanaan yang sudah di buat maka rencana tersebut di tuang dalam laporan hasil bulanan Desa berisi hasil musrembang tersebut yaitu perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, dengan adanya rencana ini maka tahap selanjutnya ialah pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dibutuhkan kerjasama yaitu membentuk ketertiban kerja dan dana yang dibutuhkan guna mencapai suatu pembangunan infrastruktur jalan. Dengan adanya proses perbaikan jalan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan pihak Pemerintah Desa dapat memudahkan masyarakat Desa dalam berhubungan dengan daerah luar. Kelangsungan pelaksanaan pembangunan jalan menjadi fokus utama bagi masyarakat setempat menjadi tanggungjawab yang besar dan harus diperjuangkan oleh masyarakat setempat. Hal ini harus menjadi perhatian khusus karena berhasilnya suatu pembangunan itu juga atas dasar dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan desa yang dilakukan oleh kepala desa, dan perangkat- perangkatnya hal ini dilakukan untuk memperlancar suatu kerja dari masyarakat guna untuk memperlancar kegiatan. Pengawasan yang dilakukan bukan merupakan keraguan dari aparat desa dengan kerja masyarakat melainkan sebagai wujud dari kepedulian terhadap warganya. Namun, yang lebih penting adalah perbaikan apabila ada kekurangan dari kegiatan- kegiatan tersebut. Hal ini diambil alih supaya apa yang

direncanakan berjalan sebagaimana mestinya dan terarah.

Pemeliharaan jalan yang dilakukan yaitu secara berkesinambungan dengan memperbaiki jalan yang rusak parah. Dengan penangangan pemeliharaan jalan dapat dilakukan secara rutin maupun berkala. Pemeliharaan jalan secara rutin dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun dan dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun dan dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan yang terjadi belum meluas. Perawatan dan perbaikan dilakukan pada tahap kerusakan yang masih ringan. Hal ini sehubungan dengan biaya perbaikannya yang relatif rendah dan cara memperbaikinya pun relatif mudah.

Partisipasi Masyarakat

Pembangunan infrastruktur jalan desa sangat penting guna untuk menunjang berjalannya kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pada proses pembangunan jalan desa sangat perlu untuk melibatkan partisipasi dari masyarakatnya karena partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan dalam suatu proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan pola yang melibatkan peran dari masyarakat. Masyarakat dalam proses pembangunan adalah sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa dalam ini Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan Desa, diperlukan upaya dari berbagai pihak. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil; a) Melakukan sosialisasi yang efektif mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan. b) Mengadakan pertemuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. c) Melibatkan masyarakat

dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan. d) Membentuk kelompok Gotong royong masyarakat yang terlibat langsung dalam pemeliharaan infrastruktur jalan.

Pembangunan infrastruktur jalan desa sangat penting guna untuk menunjang berjalannya kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pada proses pembangunan infrastruktur jalan di desa banyak melibatkan partisipasi dari masyarakat, ini didasarkan pada data yang sudah tertera pada tabel dibawah ini. Adapun proses pembangunan jalan yang sudah dilakukan Desa dalam 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel pembangunanyang tertera dibawah ini

Tabel.1. Jenis Kegiatan Pembangunan Jalan di Desa tahun 2022 hingga tahun 2023

No	Tahun	Jenis Kegiatan Pembangunan
1	2022	Jalan Antar Dusun Rabat Beton
2	2022	Jalan Gang Rabat Beton
3	2022	Membuat Jalan Baru
4	2023	Jalan Antar Dusun Rabat Beton
5	2023	Jalan Tani Tabat Beton
6	2023	Pemadahan dan mengerasan jalan dusun

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pelaksanaan, merupakan ide atau gagasan penting yang harus dimunculkan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur jalan. Biasanya masyarakat Desa menyampaikan partisipasinya diwaktu musyawarah, yang diadakan langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat, dimana ide atau gagasan tersebut kemudian disampaikan ke perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam menyampaikan ide ataupun gagasan dari masyarakat, kepada pemerintahan desa,

dapat dilakukan dengan baik. Adapun pembangunan infrastruktur jalan desa adalah menjadi hal penting untuk akses Masyarakat dalam distribusi hasil pertanian. Sehingga partisipasi masyarakat berkaitan sangat dengan tercapainya dan terlaksananya suatu program yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan bantuan beberapa tentunya pihak masyarakat yang turut ikut andil untuk berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat khususnya dalam membangun infrastruktur jalan Desa, ada juga yang berupa tenaga. Artinya, partisipasi dalam pengambilan manfaat sangat berperan penting, seperti halnya masyarakat desa dapat ikut andil secara langsung untuk membantu proses penyelesaian pembangunan infrastruktur, yaitu dengan cara terjun atau turun langsung ke lapangan. Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan meliputi; adanya sumber dana, kegiatan admisnistrasi dan koordinasi. Partisipasi ini merupakan lanjutan rencana yang telah digagas, baik berkaitan dengan rencana pelaksanaan maupun tujuan dari perencanaan. Oleh karenanya, bertindak bersama-sama atau gotong royong merupakan salah satu bentuk keterlibatan untuk melancarkan sebuah rencana.

Dukungan dari masyarakat terlihat bukan hanya tentang pendanaan, nasihat atau pemikiran lainnya. Melainkan untuk mengembangkan dan menjalankan program kegiatan, masyarakat Desa sangat antusias, dengan cara memberikan kekuatan tenaga ataupun fisiknya untuk kelancaran pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan Desa, tentunya dapat memberikan dampak positif kepada individu-individu masyarakat, dan dapat juga menumbuhkan rasa kepekaan sosial terhadap keadaan sekitar.

Masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk tenaga, dalam hal ini partisipasi masyarakat dapat dikatakan sangat baik. Hal

ini dibuktikan dengan kesatuan atau kekompakan masyarakat penduduk Desa yang memiliki rasa tanggungjawab bersama, serta saling sangat menghargai satu sama lain. Sehingga mereka saling mengenal dengan baik antar satu sama lain, dan arah kehidupan mereka dapat dikatakan terbuka.

Keberhasilan pembangunan sebuah infrastruktur, tidak dapat dipisahkan dengan partisipasi masyarakat. Baik partisipasi yang bersifat sukarela maupun bersifat himbauan/perintah dari pemerintah setempat. Dalam hal ini menunjukkan adanya suatu hubungan bahwa pembangunan akan berjalan dengan baik apabila ditopang oleh partisipasi seluruh elemen terkait. Adanya partisipasi masyarakat akan membuat terlaksananya pembangunan infrastruktur jalan, dengan demikian masyarakat Desa berpartisipasi dengan baik berdasarkan pengamatan penulis bahwa Terdapat empat jenis partisipasi di Desa yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur merupakan persyaratan utama yang melandasi keberhasilan dalam proses Pembangunan desa, partisipasi sangat bergantung pada kondisi ekonomi, sosial, budaya dan keberadaan lingkungan dari masyarakat yang terlibat, serta tingkat pendidikan masyarakat. Sosial ini maksudnya adalah bahwa para perencana dapat mengetahui bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, baik dalam faktor: geografis, organisasi, budaya lokal, ekonomi masyarakat serta sosial politik yang berkembang. Adapun di Desa, yaitu faktor ekonomi, faktor kesadaran, faktor pendidikan dan faktor kebiasaan hidup gotong royong. Salah satu faktor pendukung masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan Desa. Karena dengan adanya faktor ekonomi, dapat

membuat masyarakat semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Didesa bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ialah aspek ekonomi, dimana masyarakat dapat merasakan mudahnya melakukan aktifitas perekonomian, seperti para petani yang langsung dapat menjual produknya, Masyarakat dapat merasakan kemudahan akses jalan. Karakteristik wilayah perdesaan yang ditinjau dari aspek ekonomi dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan dan mayoritas pekerjaan penduduknya.

Apabila ditinjau dari aspek ekonomi dan partisipasi masyarakat, karakteristik Desa terletak pada tingkat kesejahteraan penduduk, dimana kesejahteraan masyarakat Desa dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga didukung oleh pembangunan infrastruktur jalan desa. Selanjutnya, suksesnya sebuah pembangunan infrastruktur, tentunya terdapat peran dan campur tangan dari masyarakat sekitar. Dimana masyarakat memiliki rasa solidaritas yang tinggi untuk ikut berpartisipasi dan tolong menolong, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

Masyarakat memiliki kesadaran untuk terbuka, Inilah yang menjadi faktor pendukung yang dapat dikatakan penting. Sebab, dengan adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari semua pihak, tentunya akan membuat masyarakat lebih semangat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap program yang diadakan oleh pemerintah desa, dan tentunya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk Selain faktor ekonomi dan faktor kesadaran, terdapat satu faktor yang menjadi pendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan desa yaitu faktor pendidikan. Masyarakat Desa sangat peduli terhadap pendidikan hal ini dapat dilihat dari salah satu faktor pendukung pembangunan infrastruktur ialah faktor pendidikan. Dalam

arti lain memudahkan masyarakat dalam mengakses tempat-tempat pendidikan demi lancarnya anak-anak sekolah sehingga meminimalisir terjadinya keterlambatan, Pendidikan merupakan hal penting yang harus diperjuangkan, oleh masyarakat secara umum dan orang tua secara khusus. Selanjutnya, tentunya ada faktor penghambat yakni ketidaksadaran akan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan desa, masih ada salah satu kelompok masyarakat yang masih egois akan kekuasaan tanah umum Desa namun hal ini tidak menjadi kendala yang cukup rumit karena hanya segelintir orang saja namun masih banyak orang mengharapkan akan adanya pembangunan infrastruktur jalan. Proses pembangunan infrastruktur jalan ini berjalan dengan baik dikarenakan ada tiga faktor pendukung yakni faktor ekonomi, faktor kesadaran dan faktor pendidikan yang kuat sehingga akan membuat partisipasi aktif masyarakat dengan baik sehingga terealisasinya pembangunan infrastruktur jalan Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan jalan di desa telah dilakukan dalam pembuatan jalan baru, perbaikan jalan desa demi kelancaran masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari demi kemajuan perekonomiannya. Hal ini sebagai bentuk kewajiban negara dalam menunjang pembangunan infrastruktur jalan pedesaan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan telah dilakukan dengan melibatkan semua unsur Masyarakat, yang merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat untuk dapat merasakan pemerataan Pembangunan jalan pedesaan.

Serta penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan jalan di desa dalam pembuatan jalan baru, perbaikan jalan desa terus di tingkatkan untuk kelancara arus tranfortasi dan distribusi.
2. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dengan melibatkan semua unsur Masyarakat terus di tingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Conyers, D. 1994. *Perencanaan Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Faisal, S. 2005. *Format-Format-Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Isbandi, R. 2001. *Perberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.
- Miles M, Hubermen,M. dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: Edition 3*, Arizona State University.
- Moenir, H. A. S. 2002. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia.
- Nawawi, H. 2003. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Narayan, Deepa. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Source Book*. World Bank.

Ndraha, T. 1990. *Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta .

Winarno, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Penerbit:Media. Yogyakarta.

Siti Irene, A. D. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Belajar :Yogyakarta

Sastropoerto. (1986). *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung: Alumni.

Saragi, P. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa: Alternatif Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: CV Cipruy.

Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.

Soekanto, S. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.

Supriyanto, B. 2009. *Manajemen Pererintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tengerang: CV. Media Berlian.

Tjokromidjojo, B. 1998. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.